

BAB II

TRANSFORMASI POLITIK LUAR NEGERI

TURKI

Sebelum menjelma menjadi Negara yang sangat peduli dengan apapun hal yang berhubungan dengan Islam, Turki dulunya ialah sebuah Negara yang bisa disebut sebagai negara yang memegang erat paham sekulerisme. Sekulerisme seperti menjadi pondasi yang amat kuat di Turki setelah era Turki Utsmani berakhir. Setelah Turki Utsmani runtuh, kemudian lahirlah Negara Republik Turki (Turki Modern)n yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 29 Oktober 1923. Oleh Ataturk, Turki dibentuk menjadi sebuah negara sekuler modern yang sangat berbeda dengan era Turki Utsmani. Mustafa Kemal Ataturk membuat Turki seolah-olah menjadi negara “Barat” yang berada di kawasan Timur Tengah, karena pada masa kepemimpinannya Turki sangat idetik dengan pemerintahan yang ada di Eropa maupun Amerika Serikat. Hal ini didasari oleh sikap kecewa Ataturk pada sistem kekhalifahan yang dijalankan pada era Turki Utsmani. Tak hanya di era Mustafa Kemal Ataturk saja, Turki juga masih menjadi negara Sekuler yang sedikit lebih lunak di era kepemimpinan Ismet Inonu. Dibawah kepemimpinan ismet Inonu, Turki masih menjadi negara yang memisahkan antara Agama dengan urusan Politik namun lebih terbuka terhadap pandangan islam yang sejatinya tetap bisa digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan.

A. Politik Luar Negeri Turki Kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk

Mustafa Kemal Ataturk adalah sosok penting dibalik terbentuknya Turki Modern yang menganut sekelurisme modern, yang sangat berbeda dengan sistem kekhalifahan di

era Turki Utsmani. Pandangan Atatürk mengenai sistem kehalifahan ialah bahwa struktur agama yang ada di masa Turki Utsmaniyah adalah sebuah pondasi yang sangat rapuh. Pengaturan yang berlandaskan agama kuno harus dihapuskan dan digantikan dengan hukum perdata yang modern. Atatürk berpendapat bahwa agama berada di ruang privat dan dibawah kendali dari Negara. Hal ini tentu saja sangat berbeda jika dibandingkan dengan masa Turki Utsmani yang mengedepankan pemikiran Ulama dalam membuat kebijakan Turki. Atatürk memandang ketika negara barat memisahkan agama dengan politik memberikan dampak kemajuan bagi negaranya, sehingga hal itulah yang dianggap Atatürk bisa juga jika diterapkan di Turki. Kebijakan seperti ini lah yang Atatürk coba hilangkan di Turki. Dalam singkatnya bisa dikatakan bahwa Atatürk menginginkan bahwa Negara dan Agama adalah suatu hal yang wajib dipisahkan. (Thohir, 2004)

Mustafa Kemal Atatürk sebenarnya bukan orang pertama di Turki yang mengemukakan atau memberikan gagasan mengenai sekulerisme ini. Sebelum Atatürk, ada Ziya Gökalp. Ziya Gökalp ialah seorang sosiolog yang berasal dari Turki, dimana ialah pencetus Nasionalisme di Turki. Pemikiran Atatürk dalam merubah tatanan pemerintahan Turki menjadi Sekulerisme, Nasionalisme, Westernisme terinspirasi dari pemikiran Ziya Gökalp. Pemikiran Ziya Gökalp sendiri ialah sintesa antara tiga unsur yang kemudian membentuk identitas Turki yang kuat, yaitu Islam dan diiringi modernisme yang kuat.

Ketika menjalankan pemerintahanya, Atatürk dianggap sebagai seorang yang diktator. Hal ini dikarenakan Atatürk adalah seorang yang dahulunya adalah anggota militer sehingga dalam memimpin bangsanya kala itu ia seperti sedang memimpin pasukan untuk berperang. Kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan oleh Atatürk harus dipatuhi segala lini yang ada di pemerintahan dan tidak boleh ada yang menolak. Partai yang boleh berkuasa pada saat Atatürk memimpin ialah hanya Partai Republik Rakyat (*Cumhuriyet*

Halk Partisi [CHP]). Partai ini pada saat itu dikenal sebagai partai yang keras dalam menjalankan beberapa gagasan utamanya. 3 gagasan utama dari partai tersebut ialah nasionalisme, sekulerisme, serta westernisme. Atatürk dalam memimpin Turki ingin menjadikan Turki sebagai sebuah Negara yang solid di berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, militer, pendidikan, politik, dll. Menurut Atatürk, Turki bisa menjadi Negara yang solid dalam segala aspek jika menerapkan prinsip sekuler modern serta dengan meniru apa yang telah dilakukan oleh negara-negara barat (westernisme). Intinya adalah seluruh aspek yang ada dalam pemerintahan Turki harus dipengaruhi atau dilandasi pemikiran negara barat dalam menjalankan Negara. (Thohir, 2004, hal. 223)

Dalam mewujudkan kemajuan bangsanya, menurut Atatürk Islam harus di pribumikan ke dalam budaya yang ada di Turki. Sistem kekhalifahan dihapus demikian pula dengan hukum syari'at yang sempat berlaku di Turki pun dihapuskan. Jika sistem kekhalifahan ini dihapuskan maka Turki akan bisa untuk menjalankan kerjasama dengan negara-negara barat maupun Amerika Serikat. Penghapusan sistem kekhalifahan ini menemui jalan yang cukup terjal diawal kebijakan ini dibuat. Tokoh-tokoh Islam yang mendukung sistem Khilafah yaitu Sultan Abdul Majid II menentang kebijakan ini. Sultan Abdul Majid II didukung kelompok-kelompok Islam lainnya menganggap bahwa kebijakan ini sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat Turki. Mereka terus melakukan tekanan kepada Atatürk, namun tekanan tersebut tidak dihiraukan oleh Atatürk. Atatürk justru memberikan tekanan balik kepada Sultan Abdul Majid II dan kelompok-kelompok pendukungnya dengan menganggap mereka yang menentang kebijakan pemerintah ialah pengkhianat bangsa. (Domo, Bakhtiar, & Zarkasih, 2018)

Langkah nyata Atatürk dalam mewujudkan kebijakan ini ialah dengan mengangkat topik penghapusan kekhalifahan menjadi agenda pertama bagi Turki di awal kepemimpinan Atatürk. Secara resmi pada 1 November 1922, sistem

kekhalifahan resmi dihapuskan oleh Dewan Agung Nasional dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk. (Ali, 1994) Pandangan Ataturk ialah jika ada islam dalam sendi-sendi menjalankan sebuah Negara, maka yang akan terjadi ialah bukan kemajuan tetapi kemunduran. Ataturk kemudian membuat berbagai macam kebijakan guna menguatkan sekulerisme yang akan dianut di Turki.

Kebijakan yang dibuat oleh Ataturk kebanyakan sangat merugikan bagi keberlangsungan agama Islam di Turki. Karena dalam membuat kebijakannya, ia tidak memperhatikan sekali dampak bagi agama Islam di Turki. Kebijakan-kebijakan Ataturk yang merugikan bagi agama Islam di turki antara lain ialah :

1. Penghapusan jabatan khilafah pada tahun 1924
2. Penghapusan Mahkamah Syari'ah serta jabatan Syaikh Al-Islam
3. Pembatasan Jumlah pembangunan Masjid di setiap daerah
4. Penghapusan Islam sebagai Agama negara
5. Memasukkan prinsip sekulerisme dalam politik Turki
6. Penghapusan keberlakuan melakukan poligami
7. Penghapusan madrasah islam, zawiat suffi maupun tekke (gerakan tarekat islam)

Lebih lanjut, kebijakan sekulerisme di era Ataturk juga tentang simbol-simbol religius yang ada di Turki. Kebijakan yang cukup kontroversial ialah penggantian penggunaan kopiah dengan topi kobpi yang menganut budaya barat. Serta pembatasan penggunaan pakaian yang identik dengan Islam dalam meju sekolah, maupun tempat-tempat umum di Turki. Selain perubahan fisik, yang tak kalah penting ialah perubahan penggunaan kalender dari yang awalnya menggunakan kalender hijriah, kemudian diganti dengan kalender dan jam barat pad athaun 1926. (Zurcher, 2003) Penghapusan madrasah-madrasah Islam di Turki yang sudah ada sejak taun 1300-an juga menjadi sebuah kebijakan yang

sebenarnya sangat kontroversial di era Ataturk. Karena setelah penghapusan ini, masyarakat sangat sulit untuk menemukan lembaga pendidikan yang berlandaskan agama islam yang cukup kuat.

Kebijakan Ataturk untuk membuat undang-undang persamaan gender dan menghapuskan kewajiban berhijab bagi perempuan beragama Islam juga dalam rangka untuk memperkuat sekulerisme yang dijalankan oleh Ataturk. Dengan adanya beberapa kebijakan di era awal kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, Turki kemudian mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler modern pada tahun 1937 yang kala itu juga disebut sebagai kemalisasi. (Zainal N. A., 2016)

Militer di Turki menjadi bagian yang sangat penting bagi pemimpin untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dalam ber negara. Militer di Turki menjadi satu-satunya lembaga negara yang mampu bertahan lebih dari 600 tahun lamanya, dihitung sejak jaman kekhalifahan hingga menjelma menjadi republik Turki (Turki Modern). Militer Turki di era Ataturk sebenarnya tunduk terhadap Ataturk, hal ini dikarenakan Ataturk ialah seorang yang memiliki latar belakang militer yang cukup kuat. Akan tetapi meskipun tunduk kepada Ataturk, Militer memiliki peran yang cukup penting. Militer di Turki tidak hanya memiliki kaitan dengan kemandirian di Turki saja, akan tetapi militer disini sangat terikat dengan Negara yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan dan juga sebagai pelindung keberlangsungan sistem politik di Turki. Militer di Turki juga disebut sebagai *guardian of secularism* dalam perannya sebagai lembaga yang melindungi berjalannya sekulerisme di Turki pada era kepemimpinan Ataturk. Militer juga sebagai filter kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Ataturk, karena sebelum di implementasikan kebijakan pemerintahan harus terlebih dahulu disetujui oleh Militer. Militer di era Mustafa Kemal Ataturk sebenarnya menarik diri dari politik praktis di pemerintahan, akan tetapi kemudian peran militer ialah di balik layar politik pemerintahan Turki. (Zainal N. A., 2016, hal. 23)

Perombakan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk membawa dampak sendiri bagi perekonomian Turki secara keseluruhan. Dimana dengan adanya kebijakan ini membuat banyak pedagang dari Armenia dan Yunani beralih dari Turki. Di masa awal-awal mengalami transisi ke negara republik (Turki Modern), politik luar negeri Turki cenderung untuk bergabung dengan negara-negara barat yang maju dalam hal menjalik kerjasama perdagangan. Selain dengan negara-negara dari kawasan barat atau eropa, Turki di masa ini cenderung untuk melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Bahkan, di masa ini mereka tak mengaggap lagi bahwa Turki ialah bagian dari Timur Tengah dan berfokus meningkatkan kerjasama dengan negara yang tidak berasal dari kawasan Timur Tengah.

Bisa dibilang ialah di era Mustaf kemal Atatürk, haluan politik luar negeri Turki ialah Barat. Atatürk ingin menjadikan Turki seperti layaknya negara barat yang sekuler serta menghilangkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan di Turki. Hal ini dilandasi oleh kuatnya paham kemalisme yang digalakkan oleh Turki pada era kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk.

B. Politik Luar Negeri Turki Pasca Kepemimpinan Atatürk

Keadaan Turki pasca kepemimpinan Atatürk berubah cukup drastis. Dimana semakin berkurangnya kelompok yang pro terhadap sekulerisme, bahkan semakin banyak yang berani untuk mendesak kelompok yang pro Atatürk untuk mengembalikan syariat-syaroot Islam yang telah digunakan oleh Turki dalam jangka waktu yang cukup lama di era Turki Utsmani.

Pasca wafatnya Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1938, kepemimpinan di Turki beralih kepada Ismet Inonu. Pada awal kepemimpinan ismet Inonu, timbul perlawanan dari

kaum intelektual Islam. Mereka sendiri mulai berani untuk menentang ada modernisasi ala barat yang mengabaikan kepentingan agama Islam. Masa kepemimpinan Ismet Inonu, Turki sempat diserang oleh Uni Soviet. Kala diserang oleh Uni Soviet, Turki meminta bantuan dari Amerika Serikat untuk menghadapi beberapa kali serangan yang dilakukan Uni Soviet. Serangan yang dilakukan oleh Uni Soviet ini ditujukan untuk memnita sebagian wilayah Turki bagian barat untuk didirikan pangkalamn militer. Akhirnya, dengan bantuan Amerika Serikat Turki mampu melawan apa yang diinginkan oleh Uni Soviet. Untuk membalas jasa yang telah diberikan oleh Amerika Serikat, Turki memberikan izin untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Turki.

Di era kepemimpinan Ismet Inonu, terjadilah perang dunia ke 2. Dimana pada PD II ini semakin terlihat bahwa Turki dalam implementasi kerjasamanya dengan negara lain masih condong untuk memilih kerjasama dengan negara negara eropa maupun dengan Amerika Serikat. Dimana meski tak terlibat pada PD II, menjelang berakhirnya perang Turki memilih untuk bergabung dengan Amerika Serikat.

Dalam kepemimpinannya, Ismet Inonu agak sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Mustafa Kemal Ataturk dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan agama Islam. Jika pada masa Ataturk kepentingan islam tidak dihiraukan bahkan justru membuat beragam kebijakan yang sangat merugikan islam, di masa kepemimpinannya Turki mencoba untuk memikirkan bagaimana cara membuat berbagai kebijakan yang menjunjung tinggi islam dan mulai mencoba mengurangi pengaruh dari barat. Akan tetapi pada awal kepemimpinannya pasca wafatnya Ataturk, Ismet Inonu sempat membuat kebijakan dimana kelompok-kelompok dilarang untuk menentang atau menghapus reformasi yang telah dibuat oleh Ataturk (Kemalisme). (Zainal N. A., 2016, hal. 25)

Militer di bawah kepemimpinan Ismet Inonu memiliki peran yaitu mempertahankan tatanan demokrasi yang sudah ada di Turki. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam politik di Turki, akan tetapi keberlangsungan demokrasi atau pemerintahan di Turki harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari militer. Meskipun militer tetap tidak bisa terlibat secara langsung dalam politik domestik Turki, namun militer berhak untuk melakukan intervensi jika ada gangguan yang datang dari kompetisi kekuasaan yang kemudian mengganggu stabilitas Turki. Dalam kaitannya dengan intervensi, militer Turki menunjukkan perannya ketika terjadi beberapa kali peristiwa kudeta di pemerintahan Turki. Hal ini dibuktikan pada 27 Mei 1960 ketika ada kudeta yang dilakukan oleh organisasi rahasia yang dilatarbelakangi oleh kebijakan *free enterprise system*.

Gerakan-gerakan Islam banyak bermunculan dalam kaitannya mendesak kembalinya Turki menggunakan syariat-syariat Islam seperti di era kekhalifahan. Gerakan Islam seperti Gerakan An-Nur yang dipimpin oleh Syaikh Baiduz Zaman Said An-Nursi dan Partai Salamah kemudian memberi tekanan kepada pemerintah untuk tidak lagi berorientasi kepada negara-negara Barat dalam menjalankan pemerintahan. Gerakan An-Nur sebenarnya sudah menekan pemerintahan Atatürk sebelum berakhirnya kekuasaan, namun gerakan ini baru mulai lebih agresif menekan pemerintah Turki kala berakhirnya pemerintahan Atatürk. (Zainal N. A., 2016)

Pasca kepemimpinan Atatürk berakhir, pemerintahan di Turki kebanyakan dipimpin oleh sosok yang sejatinya bertentangan dengan Atatürk dalam pemikiran tentang Nasionalisme, Sekulerisme, maupun Westernisme. Sudah ada gerakan-gerakan yang menentang sekulerisme di Turki pasca berakhirnya era Atatürk sendiri sudah bisa dikatakan masuk dalam ranah perpolitikan Turki. Hal ini dikarenakan gerakan-gerakan tersebut mampu memberi tekanan kepada pemerintah di Turki dalam kaitannya untuk mengambil ataupun membuat kebijakan di Turki. Bahkan sebenarnya sudah ada partai-partai

Islam di Turki yang membantu gerakan-gerakan masyarakat Islam dalam menentang sekulerisme di Turki. Sehingga sebenarnya pasca era Atatürk ini, sekulerisme di Turki semakin melemah dan Islam atau sistem syariah mulai bangkit dan semakin diperjuangkan di Turki. Meskipun sejatinya kelompok-kelompok Islam ini belum mampu untuk menentang adanya sekularisasi secara *direct* ke pemerintah. Namun, dengan adanya perlawanan atau tekanan dari kelompok Islam ini menunjukkan bahwa Islam yang sudah ada dan eksis di Turki dalam kurun waktu yang sangat lama tidak semudah itu untuk dihilangkan. Selain itu, kelompok ini juga bisa menunjukkan bahwa hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat Islam di Turki tetap mementingkan norma agama di dalamnya. (Zainal N. A., 2016)

Setelah era Ismet İnönü yang mulai mempertimbangkan untuk membuat kebijakan yang lebih sedikit friendly dengan Islam. Pemerintahan Turki terus berlanjut untuk membuat kebijakan yang selaras dengan Islam. Tahun 1950, Turki mengadakan pemilihan anggota parlemen yang kemudian diikuti oleh berhasilnya partai demokrat mengalahkan partai republik yang pendirinya ialah Mustafa Kemal Atatürk. Kemenangan ini membuat Celal Bayar menduduki kursi presiden di Turki dan untuk posisi perdana menteri Adnan Menderes terpilih. Kepemimpinan Celal Bayar di Turki kemudian diiringi kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan di era Atatürk. Sepuluh tahun kepemimpinannya Celal Bayar, terjadilah kekacauan politik yang terjadi di Turki. Kekacauan politik ini membuat kelompok militer di Turki turun tangan dan kemudian mengambil alih kendali kekuatan ataupun kekuasaan di Turki. Kebijakan-kebijakan di era Celal Bayar mulai berhubungan dengan Islam dan bahkan Turki menjalin hubungan yang cukup erat dengan Arab Saudi. Padahal, sebelum era Celal Bayar Turki tidak terlalu erat dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah maupun Negara yang memiliki latar belakang Islam yang kuat.

Dengan adanya kebijakan yang semakin bersahabat dengan Islam, timbul kekhawatiran yang luar biasa dari kalangan anti-Islam yang ada di Turki. Dengan adanya kekhawatiran ini kemudian Adnan Menderes mendapat vonis hukuman gantung serta Presiden Turki kala itu yaitu Celal Bayar divonis hukuman seumur hidup. Meskipun vonis tersebut tidak jadi dilaksanakan dan kemudian 2 sosok penting di Turki tersebut dibebaskan, hal ini menjadi cermin bahwa ketidaksukaan kelompok anti-Islam di Turki sangat gerah melihat keadaan di Turki yang semakin menyerap Islamisme dengan cukup kencang. Bahkan di media Turki secara terang-terangan menyebutkan bahwa vonis yang diterima oleh Perdana Menteri dan Presiden tersebut dikarenakan kebijakan politik Turki yang semakin dekat dan erat dengan Islam. Akan tetapi di sisi lain, Turki mulai mengabaikan hubungan baiknya di kancah politik dengan Israel. Kebijakan lainnya yang dianggap melenceng ialah dengan adanya kunjungan ke negara-negara teluk yang kemudian diiringi oleh ibadah haji yang dilakukan oleh Presiden Turki. Tindakan maupun kebijakan ini semakin membuat kalangan anti-Islam di Turki mengecam kepemimpinan Celal Bayar.

C. Politik Luar Negeri Turki di Era Recep Tayyip Erdogan

Era kepemimpinan Erdogan menjadi sebuah transformasi politik luar negeri yang cukup luar biasa bagi Turki. Recep Tayyip Erdogan bukanlah sosok yang baru dikenal di pemerintahan Turki. Estafet Partai Islam di Turki berasal dari Erdogan. Pada 14 Agustus 2001, Erdogan bersama dengan Abdullah Gul mendirikan partai AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi, partai Keadilan dan Pembangunan). Hasil dari pendirian partai ini, masyarakat Turki merespon dengan sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan partai AKP pada tahun 2002. Pada pemilu tahun 2002 tersebut, Partai AKP mendapatkan 367 suara dari total 550 suara di parlemen. Kemenangan partai AKP berlanjut lagi pada pemilu tahun 2007, dimana pada pemilu kali ini Abdullah Gul

menempati posisi strategis sebagai presiden Turki dan Erdogan menjadi perdana menteri Turki. Dari saat menjadi perdana menteri inilah Erdogan mulai membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi agama Islam yang sudah lama hilang. Kebijakan seperti diperbolehkannya pemakaian jilbab di kampus, serta adanya pendidikan mengaji bagi anak-anak SD di buat kembali. Pada saat menjadi perdana menteri, Erdogan dibawah partai AKP berhasil meraih simpati masyarakat Turki karena mampu untuk memberikan perubahan yang sangat signifikan di berbagai aspek kehidupan di Turki, utamanya tentang agama Islam. (Yansah, 2018)

Pada pemilu tahun 2011, Partai AKP kembali memenangkan pemilu di Turki. Erdogan menjadi perdana menteri untuk periode kedua. Tahun 2014, ketika masa jabatannya sebagai perdana menteri Turki habis, Erdogan mencoba menyalonkan diri sebagai Presiden Turki dibawah dukungan Partai AKP. Kemudian pada 10 Agustus 2014, Erdogan secara resmi terpilih menjadi Presiden Turki. Semangat islamisasi dan pemikiran politik luar Negeri yaitu konsep neo-ottomanisme selalu diagungkan oleh Erdogan. (Yansah, 2018, hal. 5-6)

Islamisasi menjadi fokus utama Erdogan dalam memimpin Turki. Kebijakan demi kebijakan yang dibuat Turki sangat kental dengan aroma Islam. Mulai dari kebijakan-kebijakan yang dibilang simpel, hingga kebijakan yang cukup rumit. Dalam politik luar negeri nya sendiri, Erdogan lebih condong kepada kawasan timur ataupun kultur Masyarakat Arab. Hal ini bisa dibuktikan dengan keterlibatan Turki dalam beberapa konflik yang dilatarbelakangi oleh Islam, seperti Konflik antara Palestina dengan israel, kemudian Konflik Suriah. Erdogan juga menekan pihak manapun yang melakukan serangan terhadap Negara- negara Islam seperti Arab, Irak, dsb. Ini artinya menunjukkan politik luar Negeri di era Erdogan lebih menunjukkan perhatian Turki terhadap dunia Islam dan lebih berani menentang Barat. Sedikit

menoleh ke belakang pada tahun 2003 saat Erdogan masih menjadi perdana menteri, Turki dengan sangat berani menolak kerjasama dengan Amerika Serikat untuk memfasilitasi invasi yang ditujukan kepada Irak.

Erdogan juga sangat aktif ikut campur dalam konflik antara Palestina dengan Israel, dimana Erdogan terus memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan serangan kepada Palestina. Proses Turki yang memberikan bantuan terhadap Palestina sebenarnya menuai ataupun melewati halangan yang cukup banyak dari Israel. Dimana pada awal pemberian bantuan kepada Palestina, aktivis kemanusiaan Turki yang diberangkatkan dengan kapal Mavi Marmara justru diserang oleh pasukan militer Israel yang mengetahuinya. Kemudian dari kejadian serangan yang dilakukan oleh militer Israel ini, beberapa warga Turki yang hendak memberikan bantuan tersebut tewas. Kejadian ini membuat prihatin dunia internasional. Dimana dunia internasional jelas mengancam tindakan yang dilakukan oleh militer Israel tersebut, sementara dari lingkup warga Turki sendiri mendesak agar Israel bertanggung jawab dalam kejadian yang telah menewaskan beberapa warga Turki tersebut. (Aziz, 2018)

Keterlibatan Turki dalam konflik Israel-Palestina ini bisa jadi merupakan keterlibatan yang cukup besar. Turki yang menjelma begitu hebatnya dalam kancah politik global, ingin memberikan pengaruh yang besar terhadap palestina. Pencapaian ekonomi yang terus melesat, serta kekuatan politiknya yang semakin membaik membuat Turki memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan dan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Salah satu implementasinya ialah dengan terus memberikan perhatian yang luar biasa terhadap konflik Israel-Palestina. Dalam menyikapi konflik ini, jelas bahwa Turki berada dipihak Palestina yang merupakan Negara yang berbasis atau memiliki ajaran Islam yang kuat didalam pemerintahannya. Keterlibatan Turki yang luar biasa di konflik ini juga dalam upaya untuk menunjukkan bahwa Turki

memiliki pengaruh yang kuat di kancah internasional dan khususnya di dunia Islam. Tak bisa dipungkiri juga bahwa konflik palestina ini adalah sebuah konflik yang strategis bagi negara-negara besar untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di kawasan tersebut. Turki pun selalu memiliki peran yang besar ketika Palestina mendapat serangan dari Israel, maka Turki akan menjadi garda terdepan negara Islam yang mencegah tindakan yang dilakukan oleh Israel tersebut. (INDONESIA, 2018)

Bantuan Turki kepada Palestina sangat besar diberikan, setelah Erdogan mulai memimpin Turki sejak 2003 sejak Erdogan menjadi Perdana Menteri hingga akhirnya menjadi Presiden Turki. Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) telah melaksanakan 400 proyek di Palestina, Jerusalem dan Tepi Barat yang telah dimulai sejak tahun 2005. Hal ini lah yang membuat rakyat Palestina sangat mengidolakan Erdogan yang sangat masif memberi bantuan, baik dalam bantuan diplomatik maupun bantuan kemanusiaan kepada Palestina. (ISLAM, 2017)

400 proyek yang telah dibangun oleh TIKA sendiri berfokus kepada infrastruktur yang ada di Palestina seperti di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemulihan beberapa monumen penting di Palestina. Pada Tahun 2016, TIKA membangun sebuah pabrik zaitun dimana tujuan pabrik ini dibangun adalah untuk membuat rakyat palestina memiliki semangat untuk kembali mandiri dalam hal ekonominya. Pabrik ini bertempat di Abasan al-Kabira dimana pabrik ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki produksi minyak zaitun yang melimpah di kawasan tersebut. (TIKA, 2015)



Gambar 1 bantuan yang diberikan oleh TIKa kepada Palestina

Pada tahun 2018 sendiri, Turki memberikan suntikan dana sebesar 10 juta dolar kepada Palestina. Dimana tentunya bantuan dana ini untuk membantu keberlangsungan pembangunan proyek di Palestina yang secara detailnya adalah di wilayah-wilayah kependudukan Palestina sendiri. Pada awalnya sendiri Turki hanya ingin menyumbang 3,5 juta dolar terlebih dahulu untuk membantu pembangunan proyek yang mendesak di Palestina. (Sodikin, 2018)